DAFTAR PUSTAKA

Agung, M. F. M. 2025. Strategi Collaborative Governance Dalam Reformasi Pelayanan Publik. *The Indonesian Journal of Public Administration,* 11(1): 18-26.

Ananda, A. N., Saputri, A., & Ganefi. 2025. Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,* 2(1): 274-279.

Budianto, A., & Mahatta, R. 2022. Dampak overkapasitas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 14(1): 45–58.

Hamja. 2024. Pembaruan Kebijakan Pemidanaan Dalam Rangka Mengatasi FaktorPenyebab *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Masalah Masalah Hukum,* 53(3): 261-270.

Istiqamah, I. 2024. *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo).* Skripsi Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kendi, Ibrahim K. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Maharaksa, M. S., dkk. 2025. Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara,* 1(6): 69-73.

Mahmud, M., & Halim, A. 2026. Tantangan Sistemik Kompetensi SDM Dan Implementasi Talent Management Terhadap Employee Engagement Di BPJS Ketenagakerjaan Mamuju, Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Nusantara,* 2(1): 206-214.

Mansur, J. 2021. Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam,* 6(11). 324-334.

Maulana, D., & Nugroho, A. 2019. *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik.* Banten: CV. AA. Rizky.

Nartin, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif.* Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Nethan, dkk. 2023. Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217–2222.

Nugraheni, A., & Purbaningrum, D. G. 2024. Implementasi Kebijakan *Grand Design* Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik,* 2(1). 011-024.

Nurcahyanti, F. W. 2022. Pengaruh Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Strudi Terhadap Toko Imamgift.art. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* 11(2). 302-3125.

Novian, R., dkk. 2018. *Strategi Menangani Overcrowding di Indoneisa: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*

Palaguna, A. A., Samudra, S., & Fadjar, A. 2023. Strategi Pengembangan Dan Inovasi Bisnis UD. Berkah Berbasis Sumberdaya Manusia. *Journal of Management and Social Sciences,* 2(3). 121-131.

Purwanza, S. W., dkk. 2022. *Metodologi Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Permana, A., dkk. 2025. Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara,* 1(5). 453-457.

Qodar, I. A., Supianto., & Wahyuningtyas, Y. W. 2022. Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. *Welfare State,* 1(1). 81-106.

Rahayu, S. 2015. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 101–110.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salusu. 2004. *Pengambilan Keputusan Stratejik.* Jakarta: Grasindo.

Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitirnai, Y. 2025. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian kualitatif: Observasi, Wawancara dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal of Education,* 5 (4). 539-545.

Shadiq, D. Z., Gumilar, G. G., & Rizki, M. F. 2025. Dampak Over Kapasitas Di Lapas Kelas IIA Bekasi Bagi Keamanan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan,* 11(4). 1498-1506.

Silistiawati, I., dkk. 2025. Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,* 5(4). 1-11.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta

Suranta, E., dkk. 2026. Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan. *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan,* 2(1). 021-030.

Tarigan, B., dkk. 2026. Problematika Overcrowding Lapas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana. *Jurnal Studi Hukum Berkelanjutan,* 10(6). 17-25.

Tarigan, H. 2017. Hambatan administrasi dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 210–225.

Tarigan, H., & Aspan, Z. 2025. Overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia: analisis dan solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–15.

Timpal, E. T. V., Pati, A. B., & Pangemanan, F. 2021. Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal* Governance, 1(2). 1-10.

Triawan, Y. A., Baharudin., & Marpaung, L. A. 2023. Analysis of The Implementation of Correctional Database System (CDS) at Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah "Advokasi",* 11(1). 107-115.

Triswinata, A. 2025. Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas dan Implikasinya Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIIB*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* 13(1). 23-38.

Umar, A, A., & Kakampu, V, A. 2022. Pelayanan Lintas Batas: Implementasi, Masalah, Dan Solusi*. Jurnal Administrasi Negara,* 28(3). 243-264.

Wani, A. , Tallo, D., & Amalo, H. 2024. Analisis Yuridis Dampak *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Ende). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum,* 1(4). 193-206.